



Prasangka Etnis dan Ujaran Kebencian: Analisis Ujaran Kebencian terhadap Etnis Tionghoa di Twitter (X)

Ethnic Prejudice and Hate Speech: An Analysis of Hate Speech Against Chinese in Twitter (X)

Adry Alim Priyatna ¹, Kunto Adi Wibowo ^{2*}, dan Nuryah Asri Sjafirah ³

- ¹ Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Email: adry21001@mail.unpad.ac.id
 - ² Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran, Email: kunto.a.wibowo@unpad.ac.id
 - ³ Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran, Email: nuryah.asri@unpad.ac.id
- * Penulis Korespondensi

Article Info

Article History

Submitted:

June 9, 2022

Accepted:

Oktober, 29 2024

Published:

Oktober, 31 2024

Keywords:

hate speech, china, chinese, critical discourse, Twitter

Kata kunci:

ujaran kebencian, cina, etnis Tionghoa, wacana kritis, Twitter

Abstract: This study aims to determine the meaning of the text of hate speech targeting ethnic Chinese in Indonesia on Twitter social media. In addition, it also aims to reveal the social cognition and social context of the discourse surrounding the phenomenon of hate speech to Chinese ethnic. This study uses a qualitative method in the form of text analysis with a critical discourse analysis approach of Van Dijk's model. The research findings show that the macrostructure of the hate speech text has a certain theme and Twitter citizens have their definition of the word "China" as social cognition. The developing social context is issues related to government policies, namely the development of the capital city of the Archipelago and the polarization of society after the 2019 presidential election, which are collected in the form of discourses of disliking President Jokowi's government.

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengetahui makna teks dari ujaran kebencian yang menysasar etnis Tionghoa di Indonesia di media sosial Twitter. Selain itu, juga bertujuan mengungkap kognisi sosial dan konteks sosial dari wacana yang melingkupi fenomena ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa. Studi ini menggunakan metode kualitatif berupa analisis teks dengan pendekatan analisis wacana kritis model Van Dijk. Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur makro teks ujaran kebencian memiliki tema tertentu dan masyarakat Twitter memiliki definisi tersendiri tentang kata "cina" sebagai kognisi sosial. Konteks sosial yang berkembang adalah isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara dan polarisasi masyarakat pasca pemilihan presiden tahun 2019, yang terkumpul dalam bentuk wacana ketidaksukaan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

PENDAHULUAN

Meski bukan fenomena baru, *hate speech* (ujaran kebencian) di Indonesia nampaknya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan ujaran kebencian ini tak jarang menimbulkan konflik antar kelompok orang (Wahyuningsih, 2021). Ujaran kebencian di Indonesia juga menyasar kaum minoritas, selain kepada masalah agama dan politik. Di Indonesia, kajian dan dokumentasi tentang ujaran kebencian meningkat sejak tahun 2015 atau bersamaan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X2015 tentang ujaran kebencian (Adiprasetyo, Rahmawan, & Wibowo, 2021). Puncaknya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada tahun 2017, penelitian Juditha (2017) menemukan ujaran kebencian memenuhi kolom komentar berita daring.

Saat ini, pihak yang berwenang di banyak negara dengan cepat mengakui ujaran kebencian sebagai masalah serius, khususnya karena sulitnya menciptakan penghalang di internet untuk mencegah penyebaran kebencian di sebuah negara (Mondal et al., 2017). Sebagai contoh Dewan Uni-Eropa (Council of Europe) membuat kampanye untuk menanggulangi ujaran kebencian di negara-negara di Eropa (Keen, Georgescu, & Gomes, 2020). Di Indonesia, ujaran kebencian sudah diatur melalui aturan hukum tentang ujaran kebencian melalui media sosial yaitu pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Sepima et al., 2021) dan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X2015 tentang ujaran kebencian (Adiprasetyo, Rahmawan, & Wibowo, 2021).

Hasil survey Microsoft bertajuk “Indeks Keberadaban Digital” atau “*Digital Civility Index*” sedikit banyak menggambarkan hal itu. Hasilnya cukup memprihatinkan karena menunjukkan

bahwa tingkat keberadaban (*civility*) warganet Indonesia sangat rendah. Bahkan, Indonesia menempati peringkat terakhir di kawasan Asia Tenggara (Mazrieva, 2021). Budiman (2023) mencatat bahwa pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi menemukan hampir 3 juta konten negatif di media sosial yang diantaranya adalah ujaran kebencian. Dari dua temuan ini, masalah ujaran kebencian di Indonesia, terutama ketika mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada sangat berpotensi meningkat seiring tensi politik yang naik.

Dari hasil pengamatan peneliti, ujaran kebencian cenderung meningkat ketika ada isu-isu yang ramai diperbincangkan, terutama jika isu tersebut berbalut masalah politik, agama, dan kesukuan. Kaum minoritas lagi-lagi menjadi korban. Ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa, yang merupakan salah satu kelompok minoritas, seringkali terjadi. Meski sudah lebih dari dua dekade berlalu sejak reformasi 1998, tapi sentimen terhadap etnis Tionghoa ternyata masih ada, bukannya semakin surut, namun nampaknya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Data dari CSIS Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumlah ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa dari 696 twit yang mengandung ujaran kebencian per bulan pada 2019 menjadi 855 twit per bulan pada 2020, secara rata-rata (Suryahudaya, 2022). Pemicu ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa bisa beraneka ragam, bisa karena kebijakan pemerintah, peristiwa politik ataupun kejadian yang ada di Tiongkok daratan.

Ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa biasanya ditujukan dengan menggunakan kata “cina”. Kata “cina” dalam konteks Indonesia sendiri memiliki makna dan sejarah yang panjang. Kata “cina” sering digunakan untuk memberi label kepada etnis Tionghoa sebagai orang luar atau non pribumi, untuk

membedakannya dengan penduduk lokal atau pribumi (Freedman, 2003). Pelabelan ini sering membuat warga Tionghoa menjadi kambing hitam dalam berbagai isu sosial ekonomi, terutama di masa krisis (Purdey, 2006). Menjadi etnis Tionghoa sangat rentan dengan tuduhan negatif yang berkaitan dengan Tiongkok daratan dan juga komunisme (Sumaktoyo, 2021).

Salah satu platform yang menjadi tempat berkembangnya ujaran kebencian adalah Twitter. Datareportal melaporkan jumlah pengguna Twitter di Indonesia adalah sejumlah 18,45 juta orang pada awal tahun 2022. Jumlah itu setara dengan 6,6% dari populasi penduduk Indonesia (Kemp, 2022), sebuah jumlah yang cukup besar.

Meski jumlah pengguna Twitter masih kalah dibandingkan media sosial lain seperti Facebook dan Instagram, namun karena tersedianya Twitter Application Programming Interface (API) perbincangan di platform ini banyak didokumentasikan dalam penelitian ataupun dalam pemberitaan. Perbincangan di Twitter menjadi lebih cair lantaran seringkali banyak tokoh publik dan politisi yang juga terlibat diskusi di Twitter. Interaksi tersebut sangat berpotensi membentuk opini publik, apalagi jika masuk ke jajaran trending.

Ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa di Twitter menjadi fenomena yang patut dicermati karena berpotensi menjadi alat politisasi terhadap kalangan minoritas. Ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Twitter sangat berpotensi meluas ke dunia nyata karena besarnya kekuatan media sosial saat ini. Studi ini bertujuan untuk mengetahui praktik diskursif dari ujaran kebencian yang menasar etnis Tionghoa di Indonesia di Twitter. Selain itu juga bertujuan mengungkap konteks sosio-kultural yang melingkupi fenomena ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa di Twitter.

Sebenarnya, tidak ada definisi resmi yang berlaku universal mengenai Ujaran kebencian (Alkiviadou, 2019). Namun, salah satu rekomendasi yang bisa digunakan adalah definisi menurut *Council of Europe Committee of Ministers*, yang menyatakan bahwa terminologi ujaran kebencian dipahami sebagai semua bentuk ekspresi yang mencakup menyebarkan, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti-Semitisme atau bentuk kebencian lainnya berdasarkan intoleransi, termasuk intoleransi yang diungkapkan oleh nasionalisme dan etnosentrisme yang agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap minoritas, migran dan orang-orang asal imigran. Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dalam artikel di laman webnya berjudul *United Nations Strategy and Plan Of Action On Hate Speech*, mengartikan ujaran kebencian sebagai segala jenis komunikasi dalam ucapan, tulisan atau perilaku, yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif dengan mengacu pada seseorang atau kelompok berdasarkan siapa mereka, dengan kata lain, berdasarkan agama, etnis, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin atau faktor identitas lainnya (United Nations, 2019).

Twitter, sebagai salah satu media sosial yang cukup banyak digunakan, tidak menyebut ujaran kebencian secara eksplisit, tetapi mereka memperingatkan pengguna bahwa mereka bisa terpapar konten yang mungkin menyinggung, berbahaya, tidak akurat, atau tidak pantas, atau dalam beberapa kasus, postingan yang salah diberi label atau menipu (Alkiviadou, 2019).

Sebelum era media sosial dan internet, ujaran kebencian juga sebenarnya sudah ada (Brown, 2018). Perbedaannya adalah pada medianya. Jika dulu secara langsung, maka sekarang melalui media

sosial. Media sosial, banyak dituding sebagai salah satu penyebab makin banyaknya ujaran kebencian. Studi oleh Barnidge et al. (2019) mengamini hal itu. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat level ujaran kebencian yang lebih tinggi di media sosial dibandingkan komunikasi secara *face to face*. Dalam studi ini, peneliti mendefinisikan ujaran kebencian sesuai dengan definisi dari *Council of Europe Committee of Ministers* dan PBB.

Lantas apa yang membuat ujaran kebencian di media sosial begitu berbeda dan lebih *powerful*. Brown (2018) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mendasarinya. Pertama, anonimitas. Salah satu keuntungan yang diharapkan dari internet sebagai media komunikasi adalah bahwa orang tidak dipaksa untuk mengungkapkan aspek identitas *offline* mereka kecuali jika mereka ingin melakukannya. Hal itu membuat orang semakin bebas mengungkapkan apa yang mereka ingin katakan. Kedua, invisibilitas. Di media sosial, orang tidak akan bertemu secara langsung, sehingga ada jarak yang diciptakan. Ketiga, komunitas. Adanya interaksi di media sosial memungkinkan orang menjumpai pengguna lain yang sepaham dengannya, hal itu semakin meneguhkan keyakinannya dalam mengungkapkan suatu hal. Keempat, sifat instan dari media sosial. Di media sosial, tak ada lagi *delay* informasi. Apa yang disampaikan akan diterima saat itu juga secara *real time*. Hal ini memungkinkan adanya umpan balik yang cepat.

Sejumlah peneliti telah mencoba mencari pola dan mengklasifikasikan ujaran kebencian sesuai terminologi dan pemahaman masing-masing. Erjavec & Kovačić (2012) membaginya berdasarkan tema apa saja menjadi sasaran ujaran kebencian. Politik internal adalah tema yang paling umum ditemui adanya ujaran kebencian. Tema selanjutnya adalah mengenai rasisme terhadap etnis tertentu. Kategori ketiga adalah soal

homoseksualitas. Meski di negara-negara barat sudah banyak yang melegalkan, tetapi ujaran kebencian terhadap kaum tersebut masih ditemui. Tema lain adalah soal agama. Kebencian terhadap agama tertentu masih menjadi topik yang ramai diperbincangkan dalam persoalan ujaran kebencian. Riset tentang klasifikasi ujaran kebencian mayoritas menggunakan metode komputasi komunikasi dengan *machine learning* bahkan *artificial intelligence* (Ayo et.al, 2020; d'Sa et.al, 2020; Mehta & Passi, 2022)

Masih terkait politik, keberpihakan juga berperan penting dalam produksi ujaran kebencian. Bajari et al. (2021) dalam studinya mengenai ujaran kebencian yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengamini hal itu. Perbincangan mengenai Anies Baswedan terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu pro pemerintah (kontra Anies) dan kubu kontra pemerintah (pro Anies). Masing-masing kubu memiliki akun-akun kunci yang menjadi penggerak atau sumber perbincangan. Hasil studi menunjukkan narasi yang dibangun adalah untuk mengkritik dan atau meremehkan kebijakan dan tindakan gubernur. Tweet dengan konten berbahaya (menghina, merendahkan, menjijikan, mengumpat, dan menuduh) adalah model yang dominan. Hal itu kemudian memicu balasan dengan pola yang sama, tetapi dengan konten satir yang lebih kasar, ironis dengan menggunakan kata benda atau nama hewan dan istilah lain yang lebih sarkastik.

Mengukur ujaran kebencian menjadi hal yang penting untuk mengetahui pola-pola yang biasanya dilakukan dalam ujaran kebencian. Mondal et al. (2017) yang mendeskripsikan ujaran kebencian sebagai postingan ofensif, yang termotivasi, baik seluruhnya atau sebagian, oleh bias penulis terhadap aspek tertentu dari orang atau sekelompok orang, mengklasifikasikan kata-

kata yang sering digunakan dalam sebuah ujaran kebencian. “Aku benci” menjadi yang teratas dalam klasifikasinya sebanyak 70,5% dari postingan ujaran kebencian di Twitter. Disusul “aku tidak tahan”, “aku tidak suka”, dan “aku sangat benci”, meski dengan perbedaan kuantitas yang sangat jauh. Ia selanjutnya mengkategorikan target kebencian, diantaranya adalah ras, perilaku, fisik, orientasi seksual, kelas, gender, etnis, disabilitas, agama, dan lain-lain.

Studi tentang sentimen negatif kepada etnis Tionghoa di Indonesia telah dilakukan oleh Lie & Sandel (2020). Dengan menggunakan analisis wacana budaya, Lie dan Sandel menunjukkan bahwa etnis Tionghoa dianggap sebagai “orang lain” dalam wacana budaya Indonesia. Hasil temuan menunjukkan bahwa bagaimana wacana dapat memainkan peran kunci dalam melegitimasi ketidakadilan, ketidaksetaraan serta penindasan. Wacana yang berkembang sepanjang sejarah Indonesia mempengaruhi bagaimana etnis Tionghoa dipandang dan diperlakukan oleh warga “pribumi”, contohnya kebijakan larangan penggunaan nama Mandarin untuk keperluan publik, kerusakan anti-cina pada 1998. Posisi etnis Tionghoa sempat terangkat ketika karir politik Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) melejit saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, tetapi kemudian kembali turun ketika Ahok terjerat kasus penistaan agama. Hal ini menunjukkan wacana yang berkembang dapat menjadi pemicu munculnya sentimen negatif kepada etnis Tionghoa.

Hasil studi Setijadi (2017) menunjukkan bahwa retorika rasisme yang muncul dalam kasus penistaan agama oleh Ahok memicu kekhawatiran tentang meningkatnya sentimen anti-Cina di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden pribumi menyebut faktor ekonomi sebagai salah

satu penyebab munculnya prasangka negatif terhadap etnis Tionghoa. Ketidaksetaraan ekonomi menjadi salah satu penyebab munculnya sentimen negatif, yang membuat etnis Tionghoa lebih rentan sebagai sasaran kemarahan dan frustrasi publik. Dalam studi lainnya, Setijadi (2019) menyatakan kondisi semakin memburuk saat kembalinya narasi xenophobia pro-pribumi dalam wacana publik, dan publik yang tampak antipati terhadap Tiongkok terutama saat menjelang pemilihan presiden 2019, di mana calon petahana dianggap terlalu bergantung pada investasi Tiongkok dan mendorong masuknya pekerja migran Tiongkok secara berlebihan.

Analisis tindakan wicara menggunakan linguistik forensik pada ujaran kebencian yang ditujukan pada etnis Tionghoa oleh Floranti (2022) mengungkap terdapat sepuluh bentuk label peyoratif terhadap etnis Tionghoa. Fadly dan kolega (2019) menggunakan analisis wacana kritis dalam membedah representasi Cina di Twitter yang menemukan penggunaan istilah Cina yang tidak pantas. Istilah Cina juga digunakan secara serampangan untuk menunjuk baik negara Tiongkok maupun etnis Tionghoa (Fadly dkk, 2019). Penelitian ini mencoba mengisi gap penelitian tentang ujaran kebencian terutama yang ditujukan pada etnis Tionghoa di media sosial Twitter yang belum terdokumentasikan secara sistematis dan akademik di Indonesia. Lebih khusus lagi, penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis untuk membedah wacana tentang ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa.

Studi ini mencoba untuk mengungkap bagaimana pola dan makna dari struktur teks ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa di Twitter pada 2022. Selain itu, peneliti juga berusaha memahami kognisi sosial dari warganet sebagai produsen teks di Twitter terhadap definisi “cina” serta konteks yang ada saat

teks ujaran kebencian dibuat dalam kurun waktu tersebut.

Berdasarkan data CSIS, terdapat peningkatan ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa sepanjang 2019-2020. Oleh karena itu, menarik untuk mengetahui bagaimana produksi ujaran kebencian pada 2022, yang berdasar riset awal peneliti ternyata masih banyak ditemukan ujaran kebencian yang ditujukan ke etnis Tionghoa, walaupun telah tiga tahun berlalu sejak Pemilu 2019 dan dua tahun menjelang Pemilu 2024. Harapannya, studi bisa berguna bagi pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan ujaran kebencian terhadap kaum minoritas dan mencegah semakin meluasnya fenomena ujaran kebencian, serta bagi warganet agar lebih menjaga etika dalam menggunakan media sosial.

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif berupa analisis teks dengan pendekatan analisis wacana kritis. Analisis wacana digunakan untuk tiga macam hal. Pertama, untuk memberikan gambaran dari tata kalimat, bahasa dan juga pengertian bersama. Kedua, analisis wacana digunakan untuk mencari makna-makna dan maksud tertentu dari suatu teks. Ketiga, analisis wacana dipakai untuk menggambarkan kuasa yang ada dari sebuah proses bahasa (Eriyanto, 2015).

Analisa ini disebut analisis wacana kritis karena menggunakan perspektif kritis. Dalam paham analisis wacana kritis, teks tidak dianggap bebas nilai dan memberikan gambaran realitas yang sebenarnya. Menurut Fairclough (2013), analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor yang penting, bagaimana bahasa dipakai untuk melihat ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk. Analisis wacana kritis dari Van Dijk seringkali disebut dengan kognisi sosial. Menurut

Van Dijk, analisis terhadap wacana tidak cukup hanya kepada teks saja, namun juga terhadap cara dan kenapa teks itu diproduksi, termasuk konteks yang melingkupi produksi teks tersebut. Ada tiga dimensi dalam Analisis Van Dijk, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks (van Dijk, 1997). Dimensi teks digunakan untuk penegasan tema tertentu melalui struktur teks dan strategi wacana. Dimensi kognisi sosial mengamati proses produksi yang melibatkan kognisi penulis teks. Sementara dimensi konteks mempelajari wacana yang muncul di masyarakat terhadap suatu masalah (van Dijk, 2005).

Dalam studi ini, analisis teks digunakan untuk mengetahui pola dan struktur teks ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa yang diproduksi. Analisis kognisi sosial untuk membuat kategorisasi ujaran kebencian dalam hal bagaimana pengguna Twitter mendefinisikan “cina”. Dimensi konteks menganalisis wacana dan situasi yang berkembang dalam masyarakat pada saat teks ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa diproduksi.

Pengumpulan data komentar di media sosial dilakukan dengan menggunakan situs web <https://exportcomments.com> untuk menghimpun cuitan di lini masa Twitter yang menunjukkan adanya ujaran kebencian yang ditujukan kepada etnis Tionghoa. Data yang menjadi sampel adalah data twit dengan kata kunci “cina”, dan untuk menjaga faktor kebaruan ditetapkan periode selama kurang lebih tiga bulan pada 2022, yaitu mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022. Untuk membatasi asal twit, peneliti hanya akan mengambil twit dengan penanda lokasi profil di Indonesia dan berbahasa Indonesia. Peneliti membatasi sampel twit hanya yang mengandung kata-kata yang menyerang etnis tinghoa, baik berupa kebencian, memberi stereotipe, memaki, melecehkan, menghina, mengintimidasi,

menghasut untuk melakukan kekerasan, atau diskriminasi. Peneliti menggunakan kata tertentu yang mengikuti atau mengawali kata cina, untuk menyaring twit yang mengandung ujaran kebencian, kata tersebut adalah “anjing”, “babi”, “bangsat”, “cukong”, “komunis”, “babu”, “jongos”, “antek”, “sipit” dan “sialan”. Selain kata tersebut, peneliti melakukan analisis lebih lanjut untuk menganalisis ujaran kebencian di luar kata khusus tersebut di atas. Dengan kriteria penyaringan seperti di atas, sebanyak 346 twit menjadi sampel akhir untuk dianalisis, dari data awal hasil *crawling* sebanyak 65.587 twit. Karena banyaknya data teks dan twit yang perlu dianalisis, untuk analisis teks, peneliti hanya fokus pada karakteristik makro dari twit yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, fokus semacam ini pernah dilakukan sebelumnya dalam studi mengenai analisis wacana kritis pada komentar di situs web berita (Erjavec & Kovačić, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tema Ujaran Kebencian kepada Etnis Tionghoa

Analisis teks adalah yang pertama dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sampel twit yang mengandung ujaran kebencian dengan kata kunci Cina. Pada tahap ini, peneliti hanya fokus meneliti struktur makro dari twit ujaran kebencian berupa tema ujaran kebencian yang merujuk pada kata kunci “cina”. Salah satu temuan peneliti dalam analisis teks adalah hampir semua twit bernada ujaran kebencian merupakan twit *reply* terhadap twit lainnya. Artinya, ujaran kebencian yang muncul disebabkan adanya pemicu yang menjadikan seseorang mengeluarkan twit bernada ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa.

Analisis terhadap media sosial Twitter menjadi menarik karena antar twit tidak berkaitan satu sama lain. Namun, hasil analisis menunjukkan adanya

hubungan atau persamaan tema serta maksud dari sejumlah twit. Dari sampel twit yang analisis menunjukkan adanya unsur politis dari sebagian besar twit. Twit semacam ini mengaitkan kedekatan pemerintah dengan etnis Tionghoa, baik “cina” yang merujuk pada etnis Tionghoa, maupun “cina” yang merujuk pada negara cina. Keduanya sama-sama menjadi sasaran ujaran kebencian berkaitan dengan unsur politik.

Aspek politis berkaitan dengan tema pertama yang paling banyak dicuitkan, yaitu berkaitan dengan *antek* cina. Kata *antek* juga bisa digantikan dengan kata lain seperti budak, *kacung*, *babu* atau *jongos*, tetapi masih dalam konteks yang sama. Ujaran kebencian dengan tema ini dicuitkan dalam 125 twit. “Antek Cina” ini dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi beserta jajarannya, beserta sejumlah tokoh yang dianggap *buzzer* pemerintahan Jokowi, yang kemudian lebih populer dengan sebutan *buzze rp*. Berikut beberapa twit dengan tema “Antek Cina”

Biadab kau buat sendiri kau posting sendiri dasar biadab ,kalau kau ngak ngurus sibahar ngak bisa makan kau, kalian di Jawa yg besar besarkan Habib sekarang kalian yg sibuk,kalian bekaca,sekarang kalian sdh jadi babu cina, bazzzer Rp biadab Mentang-mentang udah jadi *jongos* “cina” komunis .. semua yg berbau Islam di kerangkeng ?!!

Selain *antek* cina, peneliti menemukan adanya ujaran kebencian yang bertemakan reaksi terhadap “sikap dan tindakan warga etnis Cina”. Sikap dan tindakan yang dimaksud adalah berkonotasi negatif, antara lain “cina” suka mangkir membayar pajak, warga keturunan “cina” yang sering melakukan korupsi dan kabur ke luar negeri, etnis “cina” merampok uang negara, “cina” hanya meraup keuntungan di Indonesia,

dan lain sebagainya. Berbagai aksi dan tindakan inilah yang kemudian memicu timbulnya kebencian terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Berikut sejumlah twit dengan tema “sikap dan tindakan etnis Cina”.

Cina yg suka *ngemplang* pajak, buat kredit macet, suka bawa kabur duit, *nebang* hutan jutaan hektar, yg mengakibatkan bajir di Kalimantan lo ! puji setinggi langit. Pernah kah pendatang dari Arab bawa kabur duit? *Cebong* super *goblog*, yg otaknya di dengkul. A nies terus yg lo! kritik !

wni Tionghoa *bangsat* yang enak numpang hidup di Indonesia sbgai wrga negara bajakan, *kayak* babi dan tikus cm bs mngerat dan meraup keuntungan di Indonesia. Pribumi Indonesia jls sbgai wrga negara kls 2, miskin dan kelas pekerja yg setia di-*begoin* konglomerasi cina anjing!

Tema selanjutnya yang peneliti temukan adalah mengenai sifat dari etnis “cina” itu sendiri. Di Indonesia sendiri, sudah jamak adanya stereotipe terhadap suku atau enis tertentu, hal ini lah yang peneliti temukan dalam twit ujaran kebencian ke etnis Tionghoa, yaitu yang berkaitan dengan sifat yang menjadi stereotip warga keturunan Tionghoa. Sejumlah sifat atau stereotip yang muncul terhadap etnis Tionghoa antara lain pelit, pengkhianat, jahat, rakus, bodoh, pengadu domba. Stereotip ini muncul di benak warganet yang mencuit di Twitter dan menjadi alasan munculnya ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa, berikut ini beberapa twit tersebut.

Pantesan pelit, cina sih
Jauhi cina jahat
Cina pengadu domba anak bangsa !!
Dalam sejarah kita, ga ada Ras cina yg ikut bantu perjuangan bangsa tuk merdeka,,👏👏 dari dulu cina tuh

penghianat & *kacung* penjajah,,
☹️👊

Salah satu fakta lainnya yang peneliti temukan dalam analisis ini adalah munculnya tema ujaran kebencian seputar seksualitas, di mana wanita etnis Tionghoa dianggap sebagai objek seksual semata. Kalimat yang muncul pun sangat kasar bahkan menjurus ke pelecehan seksual. Kebencian terhadap etnis Tionghoa di sini ditampilkan melalui kacamata pribumi dimana wanita etnis Tionghoa harus tunduk kepada pria pribumi dalam konteks seksual. Karena sangat kasarnya bahasa yang digunakan, peneliti tidak menampilkan twit yang dimaksud.

Aspek ideologi politik kembali menjadi tema yang banyak dipakai warganet untuk mengungkapkan ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa. Ini terutama berkaitan dengan ideologi yang sangat dekat dan menjadi anggapan umum warga Indonesia jika mendengar kata “cina”, yaitu komunis. Keterlibatan Tiongkok pada pemberontakan PKI pada 1965 dan ideologi komunis yang dianut oleh negara Tiongkok dengan Partai Komunis Tiongkok sebagai partai tunggal, membangun asosiasi kognitif yang dekat antara “cina” dan komunis. Di sisi lain, perkembangan ekonomi Tiongkok setelah 2000-an melekatkan asosiasi ideologi kapitalisme pada negara Tiongkok. Kapitalisme juga dilekatkan pada keberhasilan ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia yang duduk dalam 9 dari 10 orang terkaya di Indonesia (Nabila, 2024). Kognisi yang paradox ini tidak berusaha didamaikan oleh warganet, tetapi justru menjadi bahan bakar ujaran kebencian yang bisa menyasar etnis Tionghoa dari posisi ideologi politik manapun. Twit terkait tema ideologi bisa dilihat di bawah ini.

Setelah polri kini tni yg dijadikan alat pukul rejim mukidi .. secara tdk langsung aparat hukum n aparat

pertahanan di adu domba dg ulama n rakyat .. sdh jelas bagian strategy dr komunis cina untuk kembali kuasai negeri setelah kudeta pki 65 gagal ..

kan Singapore dekat dng India dan cina komunis. Tau sendirilah. Komunis PKI Indonesia juga sepertimu mau menghapus agama. Bhkan sudah dimulai dng Nasakom (Lekra) kamu ada bljr ini masa SMA !! Pret! 😊 😊

Jangan mau cina kapitalis

Selain politik, peneliti juga menemukan fakta mengenai penggambaran ujaran kebencian melalui perbandingan dan asosiasi dengan binatang. Tak sedikit twit yang memunculkan nama beberapa hewan tertentu untuk dilekatkan dengan kata “cina”. Dua hewan yang paling sering digunakan adalah babi dan anjing. Kedua hewan ini dijadikan kata umpatan metaforis dengan menunjuk sifat yang menjijikan dari binatang dan diharamkan oleh agama Islam (Indrayatti, Lestari, & Lolita, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa bagi beberapa warganet, kebencian terhadap etnis Tionghoa sudah sangat tinggi sehingga mampu mengasosiasikan etnis Tionghoa dengan nama binatang. Di bawah ini, adalah twit ujaran kebencian dalam tema binatang yang muncul.

*Kadr*un dilarang nonton..khusus untuk bani bacin...ava muslim..begini kelakuan..kami bangga dipanggil kadr*un*..lo Babi Cina..dasar aseng..

Indonesia jg ikut perang lawan cina anjing dimari

BaCinKo = Babi cina Komunis ?

Tema yang juga populer menjadi sasaran ujaran kebencian adalah mengenai agama. Dimana menurut warganet Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, etnis Tionghoa adalah non muslim dan disebut dengan kafir, dalam konteks

yang negatif. Umpatan kafir terhadap etnis Tionghoa menjadi salah satu yang terbanyak peneliti temui dalam twit *hate speech*, dan biasanya diiringi dengan sumpah serapah dari warganet. Berikut beberapa twit tersebut.

Kaum kafir *bodat* memang pendukung cina, kalau nanti negeri ini dikuasai cina maka kau akan di jadikan anjing cina. Kau *bodat* sempak [celana dalam] merah kerja kau hanya nyerang Anies

Setelah anak anak komonis [komunis] *gedek* [dewasa) Indonesia mulai terjadi perpecahan makanya jaman bapak Suharto PKI dan antek-anteknya dibunuh semua. Cina lebih berbahaya dari pada Arab, sekarang yg benci Arab adalah kafir dan komonis [komunis] bersatu

Terakhir, peneliti menemukan bahwa tema terkait tenaga kerja juga muncul cukup banyak dalam sampel twit. Tema ini bisa muncul berkaitan dengan isu datangnya banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) asal “cina” di Indonesia untuk mengerjakan sejumlah proyek (Rahayu, 2016). Isu ini banyak diangkat dan dikaitkan dengan kedekatan pemerintahan Jokowi dengan negara Tiongkok dan etnis Tionghoa di Indonesia. Relasi ini akan lebih banyak dibahas dalam konteks sosial yang melingkupi ujaran kebencian pada sub bab selanjutnya. Berikut sejumlah twit ujaran kebencian terkait tema tenaga kerja.

Cina juga jualan brg2nya ke Indo, nyari market terbesar dan konsumtif nya di Indo, cina jg ngirim TKA2 kasar dan jorok2 ke Indo, cina jg nyebarin hutang2 Ribanya ke Indo dan negara2 miskin lainnya buat ngeruk SDA yg dikirim ke negara Cina, PAKET GOBLOK YANG LENGKAP!!!

@TanHuihui19 @SianglaparTogar Iya itu yg sllu dijelaskan rezim Jokowi dan si Lohot. dan para BuzzerRpnya. Utk apa saya ke

LNlucu aja kamu. gue Udeh bilang. Beritanya tiap bulan dan tiap hari beredar luas. Bhwa TKA ini adalah sumber masalah. bagian dari Ngutang ke komunis Cina. Inilah akibatnya. Harus ditampung

Kognisi Sosial

Untuk membongkar makna tersembunyi dari teks, dalam hal ini adalah twit ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa, langkah selanjutnya dari peneliti adalah melakukan analisis kognisi. Dalam konteks studi ini, kognisi sosial dipahami sebagai bagaimana orang yang memproduksi twit mendefinisikan “Cina” dalam sudut pandang mereka. Van Dijk menyatakan bahwa untuk mengetahui kognisi sosial dari pembuat teks dan bagaimana suatu teks diproduksi, peneliti perlu mengetahui bagaimana jalan pikiran pembuat teks dengan melakukan wawancara (Eriyanto, 2015). Karena keterbatasan akses dan waktu, dalam studi ini, analisis kognisi sosial dilakukan dengan menganalisis twit yang diproduksi dan diasosiasikan dengan situasi sosial yang melingkupinya. Peneliti menganalisis bagaimana skema peristiwa dan memori dari pembuat twit berkaitan dengan konteks dan situasi sosial yang melingkupinya, dengan memposisikan diri sebagai pembuat dan selanjutnya melakukan kategorisasi pada sampel twit.

Hasil analisis menunjukkan terdapat 27 kategori kognisi sosial terhadap “cina” menurut para pembuat twit. Dari 27 kategori tersebut, terdapat 7 kategori yang paling sering muncul, yaitu “cina” adalah komunis, “cina” memiliki sifat jahat, “cina” memiliki pengaruh ekonomi dan politik di Indonesia, “cina” sebagai objek seksual, “cina” diasosiasikan dengan binatang, “cina” sebagai pengirim banyak TKA ke Indonesia, dan “cina” identik dengan korupsi.

Cina sebagai komunis menjadi yang paling banyak muncul sebanyak 114 kali. Hal ini menunjukkan warganet pengguna

Twitter memiliki pemahaman yang sama bahwa “cina” adalah komunis. Definisi mengenai komunis juga banyak disebutkan berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dikhawatirkan oleh para warganet berpeluang bangkit kembali. Berkaitan dengan makna teks, komunis paling banyak dikaitkan dengan antek “cina” atau antek komunis, di mana pemerintahan Jokowi beserta jajarannya menjadi yang paling banyak dituduh.

Analisis peneliti selanjutnya menemukan bahwa “cina” dianggap memiliki sifat jahat. Ini tidak lepas dari memori jangka panjang warganet Twitter yang menyaksikan banyak tindakan dari etnis Tionghoa yang tidak terpuji. Salah satu yang menjadi banyak perbincangan dalam twit adalah kelakuan para konglomerat “cina” yang hanya mengeruk keuntungan di Indonesia, serakah, penipu, dan juga pengkhianat di masa kemerdekaan.

Kategori definisi selanjutnya, yaitu “cina” memiliki pengaruh ekonomi dan politik di Indonesia menjadi menarik karena lagi-lagi berkaitan dengan bagaimana pemerintahan Jokowi dianggap menjadi *antek, babu, kacung, jongos* dari Cina. Salah satunya karena dituduh banyak berhutang ke Cina. “Cina” di sini diartikan sebagai negara oleh warganet Twitter, dan karena “cina” dianggap “mampu” mengendalikan pemerintahan, maka “cina” didefinisikan memiliki pengaruh ekonomi melalui kekuatan uangnya dan politik melalui ideologi komunisnya.

Berkaitan dengan “cina” sebagai objek seksual, peneliti menemukan pola bahwa twit yang merendahkan wanita etnis “cina” sebagai objek seksual banyak berasal dari 3 pengguna saja. Pada intinya, “cina” didefinisikan sebagai pemuas nafsu atau *perek* (pelacur) saja. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa definisi ini tidak menjadi pemahaman umum oleh banyak orang.

Dalam struktur makro yang dijelaskan sebelumnya, binatang menjadi tema yang banyak dipakai untuk mengutarakan ujaran kebencian. Hal inilah yang kemudian menjadi simbol definisi bahwa “cina” adalah binatang dan diasosiasikan dengan binatang tertentu. Babi dan anjing menjadi yang paling banyak digunakan sebagai definisi. Menurut analisis peneliti, hal ini karena sifat haram kedua binatang ini untuk dikonsumsi bagi kalangan umat muslim. Ini sejalan dengan karakteristik pembuat *tweet* yang sebagian besar memposisikan diri pada kelompok muslim.

Kategori kognisi sosial selanjutnya masih berkaitan dengan pengaruh pemerintahan Jokowi, yaitu “cina” dianggap sebagai pengirim banyak TKA ke Indonesia untuk sejumlah proyek di Indonesia. Anggapan ini muncul karena banyaknya kesaksian dari pembuat *tweet* yang menyaksikan sendiri sejumlah TKA asal “cina” datang ke Indonesia. Isu ini memang telah lama mengemuka dan seringkali dijadikan senjata bagi para warganet dalam tujuannya menyerukan ujaran kebencian kepada “Cina”.

Hasil temuan lain menunjukkan “cina” didefinisikan sebagai etnis yang identik dengan tindakan korupsi. Banyak warganet yang menganggap etnis Tionghoa sebagai koruptor dan banyak yang melarikan diri ke luar negeri. Salah satu pembuat ujaran kebencian bahkan merangkum sejumlah tokoh Tionghoa yang melakukan korupsi dan merugikan negara dan dirangkum dalam sebuah kolase.

Konteks Sosial Ujaran Kebencian terhadap Etnis Tionghoa

Konteks sosial dipahami struktur masyarakat di mana terdapat interaksi lokal dari pelaku, dalam hal ini pembuat *tweet*, yang saling bersilang dengan struktur wacana yang berkembang di masyarakat (Haryatmoko, 2019). Van Dijk

menekankan dua poin penting dalam konteks sosial, yaitu kekuasaan dan akses (Eriyanto, 2015). Dalam studi ini, kita akan melihat bagaimana kekuasaan dan akses mempengaruhi produksi ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa dalam wacana yang dibangun sedemikian rupa terhadap pihak-pihak tertentu.

Hasil temuan peneliti menunjukkan ada beberapa konteks sosial yang wacananya berkembang di masyarakat selama periode Januari sampai dengan Maret tahun 2022 yang membentuk dan mempengaruhi produksi *tweet* ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa. Wacana yang hubungannya relatif kuat adalah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di pulau Kalimantan yang diberi nama Nusantara. Topik ini menjadi perbincangan hangat pada periode Februari-Maret 2022. Hal yang menjadi penghubung dengan “cina” adalah informasi bahwa pemerintah Tiongkok akan ikut berinvestasi dalam pembangunan IKN di Kalimantan (Intan, 2023). Ditambah dengan kabar bahwa tenaga kerja asing dari Tiongkok dijumpai dalam pembangunan IKN yang viral di media sosial (Purnama, 2023). Hal ini semakin menimbulkan sentimen negatif pada warganet yang menolak pembangunan IKN dan sekaligus pihak yang kontra terhadap segala hal yang berkaitan dengan “cina”.

Isu sosial lainnya yang mempengaruhi wacana yang berkembang di masyarakat adanya polarisasi antara *cebong* dan *kampret* yang dimulai sejak tahun 2019 saat pemilihan presiden antara Jokowi dan Prabowo, terutama di media sosial. Masyarakat Islam pada saat itu lebih banyak diasosiasikan mendukung Prabowo dan disebut *kampret*, berseberangan dengan Jokowi yang didukung oleh banyak tokoh keturunan Tionghoa dan para pendukung lainnya yang disebut *cebong* (Liputan6.com, 2022). Saat pilpres, juga muncul banyak informasi yang beredar di

media sosial bahwa Jokowi adalah keturunan Tionghoa dan bahkan memiliki nama mandarin. Hal inilah yang menjadikan kebencian terhadap etnis Tionghoa semakin membesar. Setelah pilpres, muncul kubu baru yang juga kontra terhadap *cebong*, yaitu *kadrin* atau *kadal gurun*. Sebutan yang merujuk kepada masyarakat pendukung Anies Baswedan dan berpakaian *ala* timur tengah dengan mengenakan baju gamis dan sorban. Jika ditelaah lebih lanjut, polarisasi ini menyebabkan munculnya ujaran kebencian dari kedua kubu, dan dalam konteks ini etnis Tionghoa yang masuk ke dalam golongan *cebong* menjadi sasaran kebencian dari kubu *kampret* dan *kadrin* yang baik secara pilihan politik dan agama jauh berbeda.

Konteks lain secara gelombang wacana tidak terlalu besar dibandingkan dua konteks di atas, beberapa diantaranya seperti kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng serta penimbunan minyak oleh pengusaha Tiongkok, serta aturan baru Kemenag tentang pembatasan penggunaan toa masjid yang juga memiliki pengaruh yang cukup kuat.

Hasil analisis peneliti menyatakan ujaran kebencian yang ditujukan pada etnis Tionghoa melalui media sosial memiliki akar kesejarahan yang kronis. Konteks arah politik luar negeri pemerintah Jokowi yang condong pada Tiongkok demi mendapatkan bantuan dan investasi pada proyek-proyek mercusuar seperti Kereta Cepat dan IKN serta kehadiran TKA dari Tiongkok menambah bahan bakar kebencian terhadap Etnis Tionghoa.

Studi ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa di Indonesia nyatanya masih banyak terjadi, dari data yang dikumpulkan peneliti, terdapat 346 twit bernada ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa dan “Cina” secara umum. Kebencian terhadap etnis Tionghoa di Indonesia masih tetap

ada dan tetap bertahan sampai sekarang, dan dipengaruhi oleh wacana-wacana yang berkembang sedemikian rupa di setiap generasi. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi hasil studi terdahulu oleh Lie dan Sandel, yang menemukan fakta bahwa etnis Tionghoa dianggap sebagai orang lain oleh warga pribumi (Lie & Sandel, 2020).

Masih maraknya ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa juga mempertegas adanya Sinophobia terhadap etnis Tionghoa, seperti yang dikemukakan oleh Kibitiah et al. (2021) dalam studinya, bahwa isu anti-Tiongkok di Indonesia mempengaruhi tatanan ekonomi politik. Sinophobia adalah ketidaksukaan atau ketakutan ekstrim terhadap orang asing, adat istiadat, agama tertentu. Hal inilah yang peneliti temukan dalam proses analisis, meski tren kebencian saat ini juga mengarah kepada “cina” sebagai entitas negara (Kibitiah et al., 2021)

Polarisasi politik *cebong vs kampret*, yang belakangan juga ditambah *cebong vs kadrin*, menjadi wacana sosial yang berpengaruh terhadap makin terjaganya kebencian terhadap etnis Tionghoa. Bahkan, meski sudah tiga tahun berjalan sejak pemilihan presiden tahun 2019, isu ini nyatanya tidak pernah surut. Karena isu tersebut, setelah ditelaah lebih lanjut, sebagian besar warganet yang memposting twit berdana ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa, termasuk keadalam kelompok *kampret* ataupun *kadrin*, jika dilihat dari atribut dan sikap politik yang ditampilkan dalam twit mereka.

Efek Pilkada DKI 2017 dalam kasus Ahok dan Pilpres 2014 dan 2019 yang menjadi awal mula polarisasi *cebong*, *kampret*, dan *kadrin* menjadi pemantik dan bahan bakar ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa. Isu ini akhirnya merembet ke wacana turunan yang menjadi kebijakan pemerintah, seperti pembangunan IKN di Kalimantan serta kedatangan TKA asal Tiongkok yang banyak dipermasalahkan oleh masyarakat.

Di samping itu ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa membuka kembali trauma ketakutan masyarakat terhadap komunis dan PKI, yang dianggap identik dengan “cina”.

Sejak zaman kolonial Belanda, Etnis Tionghoa menjadi sasaran kemarahan rakyat karena ditempatkan sebagai liyan dan menjadi alasan mengapa rakyat pribumi menderita (Carey & Noor, 2022). Namun, tidak ada usaha dari pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi etnis dan sosial sehingga luka lama tidak perlu menjadi pemantik ujaran kebencian yang kian mengoyak kesatuan bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Analisis tekstual terhadap 346 twit yang mengandung ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa menghasilkan beberapa temuan terkait dengan struktur makro dari teks. Ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa merujuk pada beberapa tema, yaitu *antek* “cina”, sikap dan tindakan buruk dari etnis “cina” di Indonesia, sifat dari Etnis “cina” yang dianggap buruk, pelecehan seksual, ideologi komunis, perumpamaan dengan binatang, tenaga kerja asing (TKA) dan juga agama. Dari tema-tema di atas, *antek* “cina” dan sikap dan tindak buruk dari etnis “cina” menjadi yang paling sering disebutkan. Struktur teks di atas menggambarkan ada dua perspektif warganet Twitter terhadap “cina”, yaitu “cina” sebagai etnis dan “cina” sebagai negara.

Analisis kognisi sosial menunjukkan beberapa pemahaman mengenai bagaimana warganet Twitter mendefinisikan “cina”. Kategorisasi terhadap definisi tersebut antara lain adalah “cina” adalah komunis, “cina” memiliki sifat jahat, “cina” memiliki pengaruh ekonomi dan politik di Indonesia, “cina” sebagai objek seksual, “cina” diasosiasikan dengan binatang, “cina” sebagai pengirim banyak TKA ke

Indonesia, dan “cina” identik dengan korupsi. Definisi yang diberikan warganet Twitter semuanya berkonotasi negatif dan merupakan bentuk kebencian baik terhadap etnis Tionghoa ataupun “cina” sebagai negara.

Dari segi konteks sosial, isu dan wacana yang melingkupi adalah pembangunan IKN di Kalimantan dan adanya polarisasi antara *cebong*, *kampret*, dan *kadrun* yang masih kuat terasa bahkan pada 2022 ketika penelitian ini dikerjakan. Kedua isi ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah, di mana kebencian terhadap etnis Tionghoa sebagian besar dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi beserta jajaran dan juga pendukungnya. Hal ini merupakan efek dari isu kedekatan pemerintahan Jokowi dengan para tokoh Tionghoa dan negara Tiongkok itu sendiri.

Bisa disimpulkan, ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa di Indonesia tidak pernah surut meskipun isu-isu yang mengiringinya semakin dinamis dan selalu berubah. Rekyasa sosial melalui pembedaan ras yang secara visual dapat mudah diidentifikasi sejak intervensi VOC dan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia menempatkan etnis Tionghoa sebagai bempér ketidakpuasan dan kemarahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan penderitaan warga pribumi. Tuan dan Nyonya Belanda yang berkulit putih bukanlah penjahat, penjahatnya adalah orang Cina yang berkulit kuning. Melalui rekyasa sosial ini, kita mendapatkan kognisi sosial yang menjadi bahan bakar ujaran kebencian. Kognisi sosial ini tidak hanya terkait dengan etnis Tionghoa namun dicampur-adukkan dengan negara Tiongkok, dan bahkan sifatnya paradoks ketika mengidentifikasi ideologi politik yang bisa komunis dan sekaligus kapitalis dalam waktu yang bersamaan.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan agar bisa melakukan analisis ujaran kebencian

kepada etnis Tionghoa di platform media sosial lainnya, sehingga ada gambaran yang lebih luas dari ragam jenis ujaran kebencian. Selanjutnya juga perlu dipahami lebih lanjut bagaimana struktur mikro teks dari ujaran kebencian, karena banyaknya produsen ujaran kebencian akan memunculkan pola dan struktur yang berbeda dan baru. Studi dari sudut

pandang kesejarahan tentang kebencian terhadap etnis Tionghoa diperlukan untuk membongkar kesejarahan dan pembentukan subjek “cina” di dalam diskursus ekonomi, politik, gender, agama, dan tentu saja ras di Indonesia yang sampai sekarang masih *understudied*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetyo, J., Rahmawan, D., & Wibowo, K. A. (2021). A meta-analysis of hate speech in Indonesia: The yielding of an academic discourse to the discourse of authority. *Pacific Journalism Review: Te Koakoa*, 27(1 & 2), 251-267.
- Alkiviadou, N. (2019). *Hate speech on social media networks: towards a regulatory framework? Information & Communications Technology Law*, 28(1), 19–35.
- Ayo, F. E., Folorunso, O., Ibharalu, F. T., & Osinuga, I. A. (2020). Machine learning techniques for hate speech classification of twitter data: State-of-the-art, future challenges and research directions. *Computer Science Review*, 38, 100311.
- Bajari, A., Istiqomah, R. N., Koswara, I., & Erlandia, D. R. (2021). Hatenoigraphy On Twitter During the Covid-19 Pandemic in Indonesia: *Hate speech Case Against Anies Baswedan. Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 68–78.
- Barnidge, M., Kim, B., Sherrill, L. A., Luknar, Ž., & Zhang, J. (2019). Perceived exposure to and avoidance of *hate speech* in various communication settings. *Telematics and Informatics*, 44, 101263.
- Brown, A. (2018). What is so special about online (as compared to offline) *hate speech*? *Ethnicities*, 18(3), 297–326.
- Budiman, A. (2023). Ujaran kebencian dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. *Info Singkat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*, 15(8), 1-5.
- Carey, P., & Noor, F. A. (2022). *Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- d'Sa, A. G., Illina, I., & Fohr, D. (2020). Classification of hate speech using deep neural networks. *Revue d'Information Scientifique & Technique*, 25(01).
- Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media: Komunikasi*. LKiS.
- Erjavec, K., & Kovačić, M. P. (2012). “You Don’t Understand, This is a New War!” Analysis of *Hate speech* in News Web Sites’ Comments. *Mass Communication and Society*, 15(6), 899–920.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge.
- Floranti, A. D. (2022). Racism toward Chinese ethnic group in Indonesian social media: Hate speeches analysis from Forensic Linguistic perspective. *JOMANTARA*, 2(2), 112-130.
- Freedman, A. (2003). Political institutions and ethnic Chinese identity in

- Indonesia. *Asian Ethnicity*, 4(3), 439–452.
- Haryatmoko. (2019). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Indrayatti, W., Lestari, D., & Lolita, A. (2019). Ungkapan Makian Bahasa Tiochiu (Studi Kasus Masyarakat Tionghoa Senggarang). *GENTA BAHTERA: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan*, 5(2), 180-191.
- Intan, G. (2023). *Jokowi Minta Dukungan China dalam Pembangunan IKN Lewat Inisiatif Sabuk dan Jalan*. VOA Indonesia; VOA Indonesia | Berita AS, Dunia, Indonesia, Diaspora Indonesia di AS. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-minta-dukkungan-china-dalam-pembangunan-ikn-lewat-inisiatif-sabuk-dan-jalan/7315726.html>
- Juditha, C. (2017). Hatespeech in Online Media: Jakarta on Election 2017. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(2).
- Keen, E., Georgescu, M., & Gomes, R. (2020). *Bookmarks (2020 Revised ed): A manual for combating hate speech online through human rights education*. Council of Europe.
- Kemp, S. (2022, February 15). *Digital 2022: Indonesia*. <https://Datareportal.Com>.
- Kibtiah, T. M., Aditya, R., Miranda, E., & Permana, A. (2021). Sinophobia in Indonesia and Its Impact on Indonesia-China Economic Cooperation with the SVM (Support Vector Machine) Approach. *2021 1st International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (ICCSAI)*, 1, 340–345.
- Lie, S., & Sandel, T. (2020). Unwelcomed Guests: Cultural Discourse Analysis of Comments on Ethnic Chinese in Indonesian Social Media. *Journal of Chinese Overseas*, 16(1), 31–57.
- Liputan6.com. (2022, April 18). *Pencetus Pertama Kali Istilah Cebong, Kampret, Kadrun dan BuzzerRp Terungkap, Siapa Dia?* Liputan6.Com.
- Mazrieva, E. (2021, February 26). *Indeks Keberadaban Digital: Indonesia Terburuk se-Asia Tenggara*. www.Voaindonesia.Com.
- Mehta, H., & Passi, K. (2022). Social media hate speech detection using explainable artificial intelligence (XAI). *Algorithms*, 15(8), 291.
- Mondal, M., Silva, L. A., & Benevenuto, F. (2017a). A measurement study of hate speech in social media. *Proceedings of the 28th ACM Conference on Hypertext and Social Media*, 85–94.
- Nabila, M. (2024). *Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Akhir Agustus 2024, Prajogo Pangestu dan Bos Djarum Masih Juara*. <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20240831/265/1795695/daftar-10-orang-terkaya-di-indonesia-akhir-agustus-2024-prajogo-pangestu-dan-bos-djarum-masih-juara>
- Purdey, J. (2006). *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996–1999: 1996-99*. University of Hawaii Press.
- Purnama, I. D. (2023). *TKA China Kerja di Proyek IKN, Serikat Buruh: Itu Merendahkan Pekerja Indonesia*. <https://Economy.okezone.com/>; <https://economy.okezone.com/read/2023/06/15/320/2831528/tka-china-kerja-di-proyek-ikn-serikat-buruh-itu-merendahkan-pekerja-indonesia>
- Rahayu, E. (2016). Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Cina (Rrc) terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal (Studi di Kalimantan Barat). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209880.

- Sepima, A., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 108–116.
- Setijadi, C. (2017). Chinese Indonesians in the eyes of the pribumi public. *ISEAS Yusof Ishak Institute*. <http://hdl.handle.net/11540/7545>
- Setijadi, C. (2019). 11 Anti-Chinese sentiment and the ‘return’ of the pribumi discourse. *ISEAS Library Cataloguing-in-Publication Data*, 194.
- Sumaktoyo, N. G. (2021). Ethnic and religious sentiments in Indonesian politics: evidence from the 2017 Jakarta gubernatorial election. *Journal of East Asian Studies*, 21(1), 141–164.
- Suryahudaya, E. G. (2022). *Hate speech Against Chinese Indonesians 2019-2020*.
- United Nations. (2019). *United Nations Strategy and Plan of Action on Hate speech*. <https://www.un.org>.
- van Dijk, T. A. (1997). The study of discourse. *Discourse as Structure and Process*, 1(34), 703–752.
- van Dijk, T. A. (2005). Critical discourse analysis. *The Handbook of Discourse Analysis*, 349–371.
- Wahyuningsih, S. (2021). Reviewing *Hate speech* in Indonesian Social Media Content: Gender and Discourse Perspectives. *ELT-Lectura*, 8(1), 48–55.